

FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEUANGAN PEMDA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH

¹Asri Nurhamidah, ²Yuli Chomsatu Samrotun, ³Endang Masitoh

¹²³Universitas Islam Batik Surakarta

mf.manarulhikam@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of Capital Expenditure, Locally Generated Revenue (PAD), and Balancing Funds on the Financial Performance of Regional Governments from 2021 to 2024. The population used in this study was 35 Regency/City Governments in Central Java. This study used a quantitative approach with a saturated sampling method. Of the 140 data collected, 6 outliers were found, resulting in 134 samples for analysis using a multiple linear regression model. The results of this study indicate that capital expenditures have no effect on the financial performance of regional governments. Meanwhile, Locally Generated Revenue and Balancing Funds show an influence on the financial performance of regional governments. This finding reflects the reasonableness of the regional financial management structure, where dependence on central fund transfers has not been able to drive optimal fiscal performance. Conversely, strengthening the capacity of Locally Generated Revenue has been proven to be a positive determinant of financial performance, emphasizing the importance of fiscal autonomy in the context of decentralization. Theoretically, this study adds to the literature on the relationship between fiscal instruments and the effectiveness of the public financial sector performance at the subnational level. In order for the results of this research to be generalized, future researchers should expand the scope of research objects by using all district/city governments throughout Indonesia.

Keywords : Factors, Financial Performance, Local Government

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan pemerintah Daerah pada periode tahun 2021 hingga 2024. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang berjumlah 35 Kabupaten/Kota. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode sampling jenuh. Dari 140 data yang terkumpul, ditemukan ada 6 *outlier* sehingga menghasilkan 134 sampel untuk dapat dianalisis menggunakan model regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan menunjukkan adanya pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan ini merefleksikan adanya kewajaran dalam struktur pengelolaan keuangan daerah, di mana ketergantungan terhadap transfer dana pusat belum mampu mendorong kinerja fiskal secara optimal. Sebaliknya, penguatan kapasitas Pendapatan Asli Daerah terbukti menjadi determinan positif terhadap kinerja keuangan, menekankan pentingnya otonomi fiskal dalam rangka desentralisasi. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai hubungan antara instrumen fiskal dan efektivitas kinerja sektor keuangan publik di tingkat subnasional. Supaya hasil penelitian ini dapat digeneralisasikan sebaiknya peneliti selanjutnya dapat memperluas cakupan objek penelitian dengan menggunakan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Indonesia.

Kata Kunci : Faktor-faktor, Kinerja Keuangan, Pemerintah Daerah

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia telah menerapkan sistem otonomi daerah. Tujuan sistem ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dilaksanakan berdasarkan prinsip neg

ara kesatuan, Dimana Pemerintah Daerah merupakan satu kesatuan dengan Pemerintah Pusat.

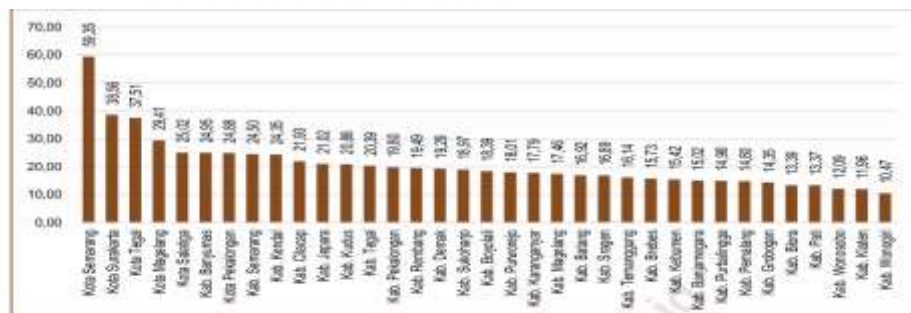
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban dengan tujuan untuk mengatur dan menjalankan masing-masing pemerintahan sesuai dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kinerja keuangan pemerintah daerah, terutama dalam aspek kemandirian fiskal menjadi salah satu indikator utama dalam mengevaluasi kesehatan keuangan pemerintah daerah. Kemandirian fiskal mencerminkan kemampuan suatu wilayah dalam memenuhi kebutuhan belanja daerah secara mandiri tanpa bergantung terhadap pemerintah pusat. Perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah atau desentralisasi fiskal. Semakin tinggi rasio PAD terhadap total pendapatan maka Tingkat kemandirian suatu daerah semakin tinggi dan Tingkat desentralisasi fiskal semakin baik. Hal itu menunjukkan bahwa belanja daerah di wilayah tersebut lebih banyak didanai dari Pendapatan Asli Daerahnya. (Widiatmika, 2024)

Perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah atau desentralisasi fiskal. Semakin tinggi rasio PAD terhadap total pendapatan maka Tingkat kemandirian suatu daerah semakin tinggi dan Tingkat desentralisasi fiskal semakin baik. Hal itu menunjukkan bahwa belanja daerah di wilayah tersebut lebih banyak didanai dari Pendapatan Asli Daerahnya.

Rasio PAD Provinsi Jawa Tengah terhadap total pendapatan pada tahun 2022 adalah 67,30 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah telah cukup mandiri dalam membiayai belanja daerahnya dengan menggunakan pendapatan asli daerahnya sendiri. Pada tahun 2023, rasio PAD ini meningkat menjadi 68,38 persen. Dengan demikian, kemampuan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki kemampuan yang semakin tinggi dalam menyelenggarakan desentralisasi. Tingkat desentralisasi fiskal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 dan 2023 masuk dalam kriteria sangat baik karena nilainya di atas 50 persen (Widiatmika, 2024)

Pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023, rasio PAD terhadap total pendapatan pemerintah kabupaten/kota se Jawa Tengah ditunjukkan pada Gambar 1.2 Kota Semarang masih menjadi satu-satunya pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah yang masuk dalam kriteria tingkat desentralisasi fiskal sangat baik yaitu 59,35 persen. Selanjutnya diikuti oleh Pemerintah Kota Surakarta (38,56 persen) dan Kota Tegal (37,51 persen) yang termasuk tingkat desentralisasi fiskal cukup. Kemudian terdapat 10 pemerintah kabupaten/kota masuk dalam kategori tingkat desentralisasi fiskal sedang dan 22 pemerintah kabupaten/kota lainnya masuk dalam kriteria desentralisasi fiskal kurang, hal tersebut dapat dilihat dari grafik di bawah ini :



Gambar 1 Rasio Realisasi PAD terhadap Total Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah (persen),2023
Sumber : BPS, (2024)

Selain Pendapatan Asli Daerah terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah diantaranya adalah Belanja Modal dan Dana Perimbangan. (Fadilah & Andriani, 2025)

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan Pemerintah Daerah, ditemukan adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dwi Apriani *et al.*, (2024) menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Fadilah & Andriani, (2025) ; Novita & Arza, (2024) dan Zamzami & Rakhman, (2023) menunjukkan hasil bahwa belanja modal mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Peneliti juga menemukan adanya *gap riset* pada penelitian yang dilakukan oleh Fadilah & Andriani, (2025);Pranita *et al.*, (2024); Novita & Arza, (2024) menunjukkan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwi Apriani *et al.*, (2024) dan Padang & Padang, (2023). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pratama *et al.*, (2024) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian terkait pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah juga menunjukkan adanya perbedaan hasil. Temuan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fadilah & Andriani, (2025) menunjukkan hasil bahwa Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pemerintah daerah. Hasil yang berbeda pada penelitian yang dilakukan oleh Pranita *et al.*, (2024) dan Novita & Arza, (2024) menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan kinerja keuangan.

Berdasarkan fenomena dan *gap riset* di atas, penulis bertujuan untuk melanjutkan penelitian untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan judul “**Faktor – Faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah**”

LANDASAN TEORI

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Grand Theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Agensi (*Agency theory*). Menurut Jensen dan Meckling (1976), hubungan agensi adalah kontrak kerja antara pihak pemberi tugas dan penerima tugas, di mana agen diberi wewenang untuk mengambil keputusan atas nama prinsipal. Penelitian ini didasarkan pada teori agensi yang memandang hubungan antara masyarakat (prinsipal) dan pemerintah daerah (agen) sebagai hubungan yang rawan konflik kepentingan. Dalam konteks ini, PAD dan belanja modal merupakan bentuk pengelolaan keuangan yang dilakukan agen.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja secara mandiri, termasuk bagaimana anggaran digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, kinerja keuangan adalah pencapaian hasil dari pelaksanaan anggaran yang tercermin dalam efektivitas realisasi pendapatan, efisiensi belanja, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Kinerja keuangan pemerintah daerah, terutama dalam aspek kemandirian fiskal menjadi salah satu indikator utama dalam mengevaluasi kesehatan keuangan pemerintah daerah. Kemandirian fiskal mencerminkan kemampuan suatu wilayah dalam memenuhi kebutuhan belanja daerah secara mandiri tanpa bergantung terhadap pemerintah pusat. Perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah atau desentralisasi fiskal. Semakin tinggi rasio PAD terhadap total pendapatan maka Tingkat kemandirian suatu daerah semakin tinggi dan Tingkat desentralisasi fiskal semakin baik. Hal itu menunjukkan bahwa belanja daerah di wilayah tersebut lebih banyak didanai dari Pendapatan Asli Daerahnya. Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah yang menggunakan indikator

Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Menurut Zamzami & Rakhman (2023), meningkatnya belanja modal mendorong kinerja pemerintah daerah. Berbagai regulasi pemerintah memastikan bahwa belanja modal akan sangat membantu daerah dalam memperoleh sumber keuangan untuk memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan asli daerah, sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah

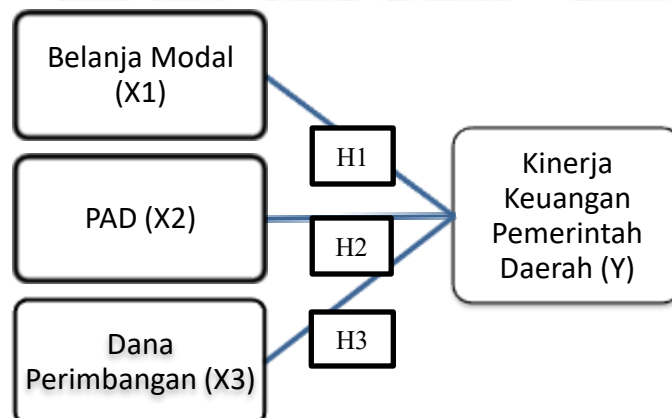
Di dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah disebutkan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. Kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan yang tinggi akan mendukung Pembangunan daerah dengan lebih efektif. (Andes Pranita, 2024).

Menurut Fadilah & Andriani, (2025), peningkatan Pendapatan Asli Daerah memberikan lebih banyak sumber daya bagi pemerintah daerah untuk mendanai Pembangunan, memperbaiki infrastruktur, dan menyediakan layanan public yang lebih baik. Selain itu, PAD yang tinggi dapat mencerminkan kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat, yang memperkuat kapasitas keuangan daerah secara keseluruhan.

Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tertulis di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, bahwa Dana Perimbangan terdiri atas Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil. Ketiga komponen dana perimbangan ini merupakan system transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh. Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintah Daerah.

Kerangka konseptual di bawah ini menjelaskan pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Dana perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah :



Gambar 2. Kerangka Konseptual

Belanja Modal pemerintah daerah secara langsung maupun tidak langsung memiliki peranan dalam memicu pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Belanja modal bersifat tidak rutin dan memiliki manfaat jangka panjang. Belanja modal yang tepat sasaran mampu mendatangkan sumber pendapatan daerah baru, (Teresa Ona Delang, 2024). Pengelolaan keuangan yang baik ditunjukkan dengan inisiatif pemerintah daerah untuk meningkatkan pendanaan belanja modal, atau untuk kepentingan masyarakat. Keberhasilan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik ditunjukkan dengan pertumbuhan pendapatan asli daerah yang lebih tinggi. Alokasi dana yang semakin besar kepada pemerintah daerah untuk pembangunan infrastruktur akan meningkatkan kinerja fiskal. (Masdar et al., 2025)

H1: Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang tinggi menunjukkan bahwa daerah memiliki kemampuan yang baik dalam menggali dan mengelola sumber daya di wilayahnya sendiri. Pendapatan yang besar memungkinkan daerah untuk membiayai operasional dan program Pembangunan secara lebih mandiri dan efektif. Pengelolaan keuangan yang baik ditunjukkan dengan inisiatif pemerintah daerah untuk meningkatkan pendanaan belanja modal, atau untuk kepentingan masyarakat. Keberhasilan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik ditunjukkan dengan pertumbuhan pendapatan asli daerah yang lebih tinggi. Alokasi dana yang semakin besar kepada pemerintah daerah untuk pembangunan infrastruktur akan meningkatkan kinerja fiskal. (Masdar et al., 2025). Pendapatan asli daerah mencerminkan potensi yang ada di suatu daerah. Pendapatan asli daerah bersifat khusus dan tidak akan memiliki nilai yang sama di setiap daerah, karena bergantung pada kondisi dan karakteristik masing-masing daerah. (Novita & Arza, 2024)

H2 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dana Perimbangan memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan-kegiatan Pembangunan dan pelayanan publik. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat, melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), masih menjadi sumber utama pembiayaan daerah. Transfer ini penting untuk mengurangi disparitas fiskal dan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh daerah. (Paulina & Supadmi, 2025).

H3 : Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode sampling jenuh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa dokumentasi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dengan periode pengamatan tahun 2021-2024. Data diperoleh dari situs resmi www.jateng.bps.go.id dan www.djpk.kemenkeu.go.id. Dari 140 data yang terkumpul, ditemukan ada 6 *outlier* sehingga menghasilkan 134 sampel untuk dapat dianalisis menggunakan model regresi linier berganda. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah aplikasi *Statistik Package For The Social Science (SPSS)* versi 25.

Tabel 1. Data Sampel Kabupaten/Kota Tahun 2021-2024

No	Nama Daerah	No	Nama Daerah
1	Kabupaten Cilacap	19	Kabupaten Kudus
2	Kabupaten Banyumas	20	Kabupaten Jepara
3	Kabupaten Purballingga	21	Kabupaten Demak
4	Kabupaten Banjarnegara	22	Kabupaten Semarang
5	Kab. Kebumen	23	Kabupaten Temanggung
6	Kabupaten Purworejo	24	Kabupaten Kendal
7	Kabupaten Wonosobo	25	Kabupaten Batang
8	Kabupaten Magelang	26	Kabupaten Pekalongan
9	Kabupaten Boyolali	27	Kabupaten Pemalang
10	Kabupaten Klaten	28	Kabupaten Tegal
11	Kabupaten Sukoharjo	29	Kabupaten Brebes
12	Kabupaten Wonogiri	30	Kota Magelang
13	Kabupaten Karanganyar	31	Kota Surakarta
14	Kabupaten Sragen	32	Kota Salatiga
15	Kabupaten Grobogan	33	Kota Semarang
16	Kabupaten Blora	34	Kota Pekalongan
17	Kabupaten Rembang	35	Kota Tegal
18	Kabupaten Pati		

Sumber : Data Penelitian

Pada penelitian ini Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang menggunakan indikator Rasio Kemandirian dapat dihitung dengan Rumus :

$$\text{Rasio Kemandirian : } \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan Permendagri (2020), Belanja Modal dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Belanja Modal : Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan + Belanja Aset Tetap Lainnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah dapat dihitung dengan rumus :

PAD : Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan + Lain-lain PAD yang sah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, dana perimbangan dapat dihitung dari :

Dana Perimbangan : Dana Alokasi Umum + Dana Alokasi Khusus + Dana Bagi Hasil

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik deskriptif digunakan untuk menunjukkan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menunjukkan nilai rata-rata (*mean*), *minimum*, *maximum*, dan *standart deviation* pada masing-masing variabel penelitian. Adapun hasil uji statistik deskriptif pada penelitian ini tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2. Hasil Uji Deskriptif

	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std Deviation</i>
BM	75.19	583.81	276.3531	106.55303
PAD	173.98	903.57	433.4319	137.47917
DP	532.90	2246.54	1378.6261	369.67713
KKPD	10.48	34.55	19.6371	5.34364

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan hasil yang disajikan pada tabel Uji deskriptif Kinerja Keuangan memperoleh hasil *mean* sebesar 19,6371 dengan nilai *minimum* 10,48 dan nilai *maximum* berada pada angka 34,55. Sedangkan untuk nilai *standart deviation* sebesar 5,34364.

Selanjutnya adalah hasil uji statistik deskriptif untuk variabel Belanja Modal menghasilkan nilai mean sebesar 276,3531 dengan nilai *minimum* pada angka 75,19 dan nilai *maximum* sebesar 583,81. Sedangkan nilai *standard deviation* sebesar 106,55303.

Uji statistik deskriptif Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperoleh hasil mean sebesar 433,4319 dengan nilai *minimum* 173,98 dan nilai *maximum* 903,57. Sedangkan nilai *standard deviationnya* beres pada nilai 137,47917.

Uji statistik deskriptif Dana Perimbangan menunjukkan hasil mean sebesar 1.378,6261 dengan nilai *minimum* sebesar 532,9 dan nilai *maximum* sebesar 2.246,54. Sedangkan nilai *standard deviation* nya 369,67713.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

	Sig.	Standar	Kesimpulan
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,200	> 0,05	Terdistribusi Normal

Sumber : Data Diolah

Hasil pengujian yang tersaji dari tabel diatas menunjukkan nilai *Asymp.Sig* adalah 0,200 yang berarti telah melebihi standar 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel memiliki data yang berdistribusi normal.

Tabel 4. Hasil uji Multikolinearitas

	<i>Tolerance</i>	Std	VIF	Std	Keterangan
BM	0,549	> 0,10	1,823	< 10	Tidak terjadi multikolinearitas
PAD	0,597	> 0,10	1,676	< 10	Tidak terjadi multikolinearitas
DP	0,531	> 0,10	1,883	< 10	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber : Data Penelitian, 2025

Hasil dari tabel diatas menunjukkan hasil bahwa, nilai *tolerance* pada setiap variable lebih dari 0,10 dan nilai VIF pada setiap variabel lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa data yang dianalisis tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 5. Hasil uji Heterokedastisitas

	<i>Sig</i>	Std	Keterangan
BM	0,411	> 0,05	Tidak terjadi Heterokedastisitas
PAD	0,244	> 0,05	Tidak terjadi Heterokedastisitas
DP	0,204	> 0,05	Tidak terjadi Heterokedastisitas

Sumber : Data Diolah

Hasil perhitungan uji heterokedastisitas pada tabel menunjukkan tidak ada *p-value* kurang dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi gangguan

heterokedastisitas dalam proses estimasi parameter model penduga. Jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah heterokedastisitas dalam penelitian ini.

Tabel 6. Hasil uji Autokorelasi

DW	DL	DU	4-DU	4-DL	Keterangan
1,945	1,6724	1,7638	2,2362	2,3276	Tidak terjadi Autokorelasi

Sumber : Data Diolah

Hasil uji autokorelasi diatas memperoleh hasil bahwa nilai DW sebesar 1,945. Berdasarkan tabel *Durbin Watson (DW)* dengan $k=3$ dan $n=134$ maka diperoleh $du = 1,7638$ dan $4-du = 2,2362$. Hal ini menunjukkan bahwa nilai DW masuk ke dalam kriteria $du < dw < 4-du$ ($1,7638 < 1,945 < 2,2362$) yang berarti model dalam penelitian ini telah terbebas dari autokorelasi.

Tabel 7. Hasil Uji Model Regresi

Unstandardized Coefficient B	
Constant	12,001
BM	-0,002
PAD	0,032
DP	-0,013

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan hasil yang tersaji dalam table diatas ditulis dengan persamaan:

$$KKPD = 12,001 - 0,002 \text{ BM} + 0,032 \text{ PAD} - 0,013 \text{ DP} + \epsilon$$

Interprestasi hasil dan analisis sebagai berikut :

Nilai konstanta sebesar 12,001 artinya Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dalam model diasumsikan bernilai 0 atau konstan maka Kinerja Keuangan mengalami kenaikan sebesar 12,001.

Besarnya nilai koefisien Belanja Modal sebesar -0,002 yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan Belanja Modal, nilai Kinerja Keuangan (Y) akan berkurang sebesar 0,002.

Nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah adalah 0,0032 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan PAD, nilai kinerja keuangan akan meningkat sebesar 0,0032.

Besarnya nilai koefisien Dana Perimbangan sebesar -0,013 yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan Dana Perimbangan, nilai Kinerja Keuangan akan berkurang sebesar 0,013.

Tabel 8. Hasil uji Kelayakan Model (Uji F)

Keterangan	F Hitung	F Tabel	Sig.	Kriteria	Hasil
Uji Kelayakan model (F)	177,560	>3,07	0,001	< 0,05	Model Layak

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 293,359. Jika dimasukkan ke dalam kriteria maka $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$ ($293,359 > 3,07$) dengan Tingkat signifikansi $0,001 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Keuangan.

Tabel 9. Hasil uji Hipotesis (Uji t)

Hipotesis	T Hitung	T Tabel	Sig.	Kriteria	Keterangan
BM	0,966	< 1,978	0,336	< 0,05	Ditolak
PAD	20,044	> 1,978	0,001	< 0,05	Diterima
DP	18,419	> 1,978	0,001	< 0,05	Diterima

Sumber : Data Diolah

Hasil pengujian pada variabel Belanja Modal menunjukkan bahwa t-hitung > t-tabel (0,966 < 1,978) dan nilai sig < 0,05 (0,336 > 0,05). Hal ini berarti menolak H1 dan dapat disimpulkan bahwa Belanja modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil pengujian pada variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan bahwa t-hitung > t-tabel (20,044 > 1,978) dengan nilai Sig. < 0,05 (0,001 < 0,05). Hal ini berarti menerima H2 dan menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil pengujian pada variabel Dana Perimbangan mendapatkan hasil bahwa t-hitung > t-tabel (18,419 > 1,978) dan nilai sig < 0,05 (0,001 < 0,05). Hal ini berarti menerima H3 dan dapat disimpulkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi

<i>Adjusted R Square</i>	Kesimpulan
0,802	Variabel independent berpengaruh sebesar 80% terhadap Variabel dependen

Sumber : Data Diolah

Tabel diatas menunjukkan bahwa hasil *Adjusted R-Square* sebesar 80 % dipengaruhi oleh variabel PAD dan Dana Perimbangan, sedangkan 20 % sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

PENUTUP

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Belanja Modal tidak memiliki pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa belanja modal yang tidak dialokasikan secara tepat.maka tidak akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga tidak berpengaruh terhadap kemandirian kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan disisi lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hal itu menunjukkan bahwa semakin besar Pendapatan Asli Daerah,maka kinerja keuangan Pemerintah Daerah akan semakin meningkat. Begitu pula dengan Dana Perimbangan, semakin besar proporsi Dana Perimbangan maka akan menurunkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, karena daerah yang masih bergantung pada dana transfer dari pusat maka akan menurunkan kemandirian keuangan daerah tersebut.

Objek pada penelitian ini terbatas hanya terhadap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah Pemerintah Daerah yang di observasi terbatas hanya sebanyak 134 sampel yang diambil dari 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 4 tahun mulai dari tahun 2021-2024, sehingga menyebabkan hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan. Supaya hasil dapat digeneralisasikan sebaiknya peneliti selanjutnya dapat memperluas cakupan objek penelitian dengan menggunakan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andes Pranita, et. a. (2024). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN. *JURNAL AKUNTANSI*, 10 Nomor 2. <https://financial.ac.id/index.php/financial>
- Dwi Apriani, R., Wahyu Setiyowati, S., & Fariz Irianto, M. (2024). DETERMINAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada Pemda Se Jawa Timur Tahun 2020-2022). In *JURNAL AKUNTANSI* (Vol. 13, Issue 1). <http://ejournal.utmj.ac.id/index.php/akuntansi>
- Fadilah, A. F., & Andriani, S. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia dengan Partisipasi Masyarakat sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 23(1), 179–198. <https://doi.org/10.24167/jab.v23i1.13363>
- Masdar, R., Furqan, A. C., & Meldawati, L. (2025). The Influence of Local Original Revenue and Capital Expenditure on the Financial Performance of District / City Governments in Central Sulawesi Province in 2019-2023. *International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics*, 4(1), 161–174.
- Novita, R., & Arza, F. I. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera Tahun 2021. *JURNAL EKSPLOKASI AKUNTANSI*, 6(1), 430–443. <https://doi.org/10.24036/jea.v6i1.1367>
- Padang, N. N., & Padang, W. S. (2023). The Influence of Local Original Revenue (PAD), Balancing Funds, and Capital Expenditures on the Financial Performance of Local Governments in Districts/Cities of North Sumatra Province. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 9(2), 303–318.
- Paulina, N. N. W., & Supadmi, N. L. (2025). The Effect of Regional Original Revenue, Transfer Revenue, and Regional Expenditure on Regional Government Financial Performance (A Study of Regencies and Cities in The Province of Bali, 2019-2023). *International Journal of Economics, Commerce, and Management*, 2(3), 90–97.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. <https://doi.org/10.1093/oed/9600622025>
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, 09 Desember LN. 2005 No. 137 (2005). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49713/pp-no-55-tahun-2005%0Ahttps://peraturan.bpk.go.id/Details/49713/pp-no-55-tahun-2005>
- Permendagri. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. *Permendagri No 77 Tahun 2020*, 1–445.
- Pranita, A., Masnila, N., Husni Mubarak, M., Akuntansi, J., Negeri Sriwijaya, P., & Selatan, S. (2024). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN. *JURNAL AKUNTANSI*, 10. <https://financial.ac.id/index.php/financial>
- Pratama, D. P., Mustika, I. G., & Karpriana, A. P. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2013-2022. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research.*, 8(4), 720–732. <https://doi.org/10.52362/jjsamar.v8i4.1609>
- Teresa Ona Delang, R. R. S. (2024). THE EFFECT OF CAPITAL EXPENDITURE ON REGIONAL FINANCIAL PERFORMANCE WITH LOCAL ORIGINAL INCOME AS AN INTERVENING VARIABLE IN DISTRICTS AND CITIES IN NTT PROVINCE IN 2017-2021. *Journal Syntax Transformation*, 29(2), 1–24. <https://doi.org/10.37202/kmmr.2024.29.2.1>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (2014).



- Widiatmika, K. P. (2024). Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah 2022 dan 2023. In *Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah* (Vol. 33).
- Zamzami, F., & Rakhman, F. (2023). Determinants of Local Government Financial Performance in Indonesia. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 12(5), 332–347. <https://doi.org/10.36941/ajis-2023-0148>

